

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
DALAM BINGKAI SOSIAL KULTURAL
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA TARAWEANG
KECAMATAN LABBAKKANG DAN KELURAHAN TONASA
KECAMATAN BALOCCI, PANGKEP)**

BUNGAWALI NURHIDAYAH



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR)*
DALAM BINGKAI SOSIAL KULTURAL
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA TARAWEANG
KECAMATAN LABBAKKANG DAN KELURAHAN TONASA
KECAMATAN BALOCCI, PANGKEP)**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

**BUNGAWALI NURHIDAYAH
A311 07 112**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2013**

SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DALAM BINGKAI SOSIAL KULTURAL (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA TARAWEANG KECAMATAN LABBAKKANG DAN KELURAHAN TONASA KECAMATAN BALOCCI, PANGKEP)

disusun dan diajukan oleh

**BUNGAWALI NURHIDAYAH
A311 07 112**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 11 Juni 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. Darwis Said, SE, M.SA, Ak
NIP : 19660822 199403 1 009

Dra. Aini Indrijawati, M.Si, Ak
NIP : 19681125 199412 2 002

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abd. Hamid Habbe, S.E., M.Si,
NIP : 19630515 199203 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Bungawali Nurhidayah
NIM : A311 07 112
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Strata satu (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Analisis Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Bingkai Sosial Kultural

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 4 Juli 2013
Yang membuat pernyataan,

Bungawali Nurhidayah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam atas kesempatan yang masih diberikan kepada penulis untuk tetap berlari memetik satu demi satu mimpi-mimpi yang penulis gantung di langit harap. Salah satunya ialah kesempatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **Analisis Implementasi *Corporate Sosial Responsibility* dalam Bingkai Sosial Kultural** untuk memenuhi persyaratan penyelesaian program pendidikan Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Dalam perjalanannya, tidak sedikit hambatan yang penulis temui. Namun berkat bantuan dari beberapa pihak, akhirnya satu demi satu hambatan tersebut dapat penulis lalui. Untuk itu, di kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih pada beberapa pihak, yaitu:

1. Kepada orang tua penulis, ibunda tercinta Nurliah Andi Mappakaya atas cinta, do'a, semangat, dan tentu saja masakan-masakannya yang selalu saja enak dan ayahanda terkasih Noor Andi Baso, terima kasih telah mengajarkan bagaimana tetap berdiri di atas keyakinan kita bahkan di saat semua orang perlahan menjauh.
2. Kepada kakak penulis, Sahib Nurrahmat, di balik semua perbedaan yang ada di antara kita, percayalah bahwa aku selalu menyayangimu. Untuk Darmawati, terima kasih telah menjadi adik sekaligus teman curhat yang baik, terima kasih juga untuk cemilan-cemilan yang selalu menemani ritual begadang ria selama ini. Tanteku tersayang, ungu, terima kasih untuk do'a lima kali seharinya.

3. Kepada yang hadir di penghujung masa studi namun sangat menggenapinya, kekasih penulis, Dandy Singkeruwali, ST., tidak pernah ada kata yang mampu mewakili rasa yang ada untukmu.
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ali, SE, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Abdul Hamid Habbe, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Drs. Haerial, Ak. selaku Penasihat Akademik atas masukan dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak DR. Darwis Said, SE, M.SA, Ak selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Aini Indrijawati, M.Si, Ak selaku pembimbing II penulis dalam menyelesaikan skripsi dan untuk Bapak dan Ibu dosen yang telah membagi ilmunya selama penulis menjalani studi di Fakultas Ekonomi ini.
8. Ibu Perpus yang sangat ramah dan baik hati. Pak Aji, Pak Budi, Pak Masse, Pak Syafar, Pak Syuaib, Pak Tarru, Pak Asri, terima kasih banyak bantuan-bantuannya selama ini.
9. Manajemen PT Semen Tonasa, warga Desa Taraweang dan Warga Kelurahan Tonasa, terima kasih atas semua bantuan selama penulis melakukan penelitian.
10. Sahabat-sahabat terbaik yang pernah dikirimkan langit untuk penulis. Untuk duo gila *side A*; Evi Dwiyani dan Lina Aliany, dan duo gila *side B*; Nurafni Oktaviah dan Fitria Idris, peluk cium termesra untuk kalian, serta teman-teman *jokka* penulis yang selalu setia menemani di masa-masa galau; annur, mila, iank, dan arun.
11. Kepada Dian Sabrina, Nurul 'nunu' Ainun, Musayyidah P.M, Rezky 'yuyun' Wahyuni, Musdalifah Isnaeni, terima kasih untuk perhatian yang

selalu mampu menjadi semangat untuk penulis.

12. Kepada pasukan rusuh; Irsyan Hasyim, Muayyidil Haq, Fajri Malagapi, Muhammad Arliman Akbar, Aidil Akbar, Abdul Darmanto, Natas Rezky, Septiandy, Hendrik, Zulkify, dan pasukan lainnya, terima kasih telah memberikan warna tersendiri dalam kehidupan penulis (khusus untuk Ir, tanpamu mungkin skripsi ini tidak akan selesai).
13. Kepada teman-teman kelas mawar; Reni, Este', Tin, Faj, Fian, Fuh, dkk, pelajaran di kelas ini sungguh telah berhasil membuat penulis melupakan sejenak segala kegalauan dalam proses pengerjaan skripsi ini, terima kasih.
14. Sorensen, Yaya', Wahyu, dan Pay, terima kasih atas pinjaman buku-buku, artikel-artikel, dan bantuan *editing*-nya.
15. Untuk orang-orang 'kampus' yang selama masa studi penulis telah banyak membantu; teman-teman Pr07ezHoLic; merlin, indo', yumi, ua', mappa, eko, mba' Na, dan 116 personil lainnya. Semua teman-teman Moneter 07. Teman-teman di MedKom; efde, nuningq, nuni, dkk. Teman-teman UKPMers, K' Udin, K' Nuru, K' Aco, K' Panji, K' Kurn, K' Haidir, Dini, Ilo, Upi, dkk. Teman-teman himpunan, senat, KPA Equilibrium FE-UH dan LPM yang pernah bekerja bersama penulis dalam berbagai kegiatan.
16. Teman-teman KKN-P di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) periode Juni-Agustus 2011.
17. Mama-mama yang sudah sangat baik dan ikhlas diutang; mama aji, mama mala, mia, kak ani, mama gondrong, mama rabiah, semoga selalu ada kesempatan untuk bisa berbagi dengan kalian.
18. Semua pihak yang telah berjasa kepada penulis selama penyusunan

skripsi ini dan dalam kehidupan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih semuanya.

Terakhir, di kesempatan ini juga penulis ingin meminta maaf apabila selama masa studi dan penyelesaian skripsi ini penulis banyak menyakiti baik melalui perkataan maupun tindakan. Semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi pembacanya.

Makassar, Juli 2013

Penulis

ABSTRAK

**Analisis Implementasi *Corporate Social Responsibility* dalam Bingkai Sosial Kultural
(Studi Kasus pada Masyarakat Desa Taraweang Kecamatan Labakkang dan Kelurahan Tonasa Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep)**

Bungawali Nurhidayah
Darwis Said
Aini Indrijawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* yang diterapkan oleh PT Semen Tonasa Pangkep dan untuk mengetahui bagaimana perubahan-perubahan pada aspek sosial kultural masyarakat sekitar industri. Penelitian ini dilakukan di Kantor PT Semen Tonasa Pangkep, Desa Taraweang Kecamatan Labakkang dan di Kelurahan Tonasa Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu dengan wawancara dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kasus (*case study*) dengan metode pemaparan kualitatif-fenomenologi. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis model interaktif Miles dan Huberman, di mana data yang dikumpul, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, CSR juga ternyata dapat membawa dampak lain terhadap sosial kultural masyarakat.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility, Sosial Kultural*

ABSTRACT

Analysis of The Implementation of Corporate Social Responsibility Within The Framework of The Social Cultural (Case Studies on Desa Taraweang Communities Kecamatan Labbakkang and Kecamatan Tonasa Kelurahan Balocci Kabupaten Pangkep)

Bungawali Nurhidayah
Darwis Said
Aini Indrijawati

This study aims to determine how corporate social responsibility adopted by PT Semen Tonasa Pangkep and to find out how the changes in the socio-cultural aspects of the community around the industry. This study performed in PT Semen Tonasa Pangkep Office, Desa Taraweang Kecamatan Labbakkang and in Kelurahan Tonasa Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep. Type of data used in this study is primary data, is data obtained from direct observations of the research object is to interview and secondary data is data obtained from the literature related to this study.

Type of research in this thesis is a case study with a qualitative method of phenomenology exposure. In this study used the method of analysis interactive model Miles and Huberman where data are collected, compiled, interpreted, and analyzed so as to provide solving those problems.

The results of this study indicate that in addition to providing direct assistance to the public, apparently corporate sosial responsibility can bring other impacts on the socio cultural society.

Keyword: *Corporate Social Responsibility, Socio Cultural*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	10
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Pembangunan Berkelanjutan.....	12
2.2 <i>Corporate Social Responsibility</i>	15
2.2.1 Definisi.....	15
2.2.2 Sejarah Perkembangan CSR.....	18
2.2.3 Komponen Utama CSR.....	23
2.2.4 Perencanaan CSR.....	25
2.3 Perubahan Sosial Kultural Masyarakat.....	28
2.3.1 <i>Stakeholder Theory</i>	30
2.3.2 <i>Legitimacy Theory</i>	31
2.3.3 Teori-teori Perubahan Sosial.....	32
2.3.4 Industrialisasi dan Perubahan Sosial Kultural - Masyarakat.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Rancangan Penelitian.....	45
3.2 Kehadiran Peneliti.....	47
3.3 Lokasi Penelitian.....	48
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	48
3.4.1 Jenis Data.....	48
3.4.2 Sumber Data.....	49
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	49

3.6 Metode Analisis Data.....	50
3.7 Pengecekan Validitas Temuan.....	53
3.8 Tahap-Tahap Penelitian.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	55
4.1 Gambaran Umum dan Profil Daerah.....	55
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	55
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Labbakkang dan Desa Taraweang Kab. Pangkep.....	58
4.1.3 Gambaran Umum Kecamatan Balocci dan Kelurahan Tonasa Kab. Pangkep.....	59
4.2 Gambaran Umum PT Semen Tonasa.....	60
4.2.1 Sejarah Singkat.....	61
4.2.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	63
4.2.3 Sistem Manajemen.....	63
4.2.4 Struktur Organisasi.....	68
4.2 Program PT Semen Tonasa Terkait CSR dan Implementasinya Terhadap Masyarakat Sekitar.....	69
BAB V IMPLEMENTASI CSR DAN PERUBAHAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SETEMPAT.....	82
BAB VI PENUTUP.....	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Jumlah Perusahaan dan Golongan Industri	
Tahun 2010.....	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Keterkaitan Integratif <i>Triple Bottom Line</i>	14
Gambar 3.1 Alur Penelitian Fenomenologi.....	47
Gambar 3.2 Alur Proses Analisis Data Miles dan Huberman.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri dimulai pada awal abad 19 yang dibawa oleh kolonial dengan mendirikan pabrik-pabrik gula yang merupakan langkah awal dalam menjajaki proses bertumbuhnya industri di Indonesia. Berdirinya pabrik gula merupakan pertanda masuknya dan dikenalnya proses industrialisasi dengan menggunakan mesin sebagai alat produksi yang berskala besar.

Di satu sisi, sektor industri atau perusahaan-perusahaan yang berskala besar telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Walaupun demikian, di sisi lain eksploitasi-eksploitasi terhadap sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pun semakin marak. Degradasi lingkungan yang cukup parah merupakan dampak utamanya. Mengenai pengelolaan lingkungan yang benar, diperlukan wawasan mengenai pembangunan sisi ekologi untuk pembangunan berkelanjutan. Menurut *Brundtland Report* dari PBB (1987), pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang menganut prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan

sosial. Menurut Budimanta (2005) pada tingkat perusahaan, penting untuk membedakan antara biaya lingkungan yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan yang dikenakan pada masyarakat sebagai "biaya sosial". Terganggunya kesehatan sebagai efek dari menghirup polusi udara, dampak pencemaran air di perikanan, atau pencemaran tanah adalah contoh klasik dari biaya sosial, atau eksternalitas yang harus ditanggung oleh masyarakat yang hidup di sekitar daerah industri.

Menjamurnya industri-industri dengan cepat membawa perubahan dratis tidak hanya pada masalah ekologi, tetapi juga melingkupi masalah ekonomi, teknologi, maupun sosio-kultural masyarakat setempat. Selain pola interaksi antara masyarakat dan alam yang berubah, masyarakat yang awalnya memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan hidupnya, menjadi sangat eksploitatif dengan adanya industri atau pabrik dalam pemanfaatan sumber daya alam, pola kerja pun turut mengalami perubahan dari pertanian ke pabrik, serta perubahan pada pola interaksi antar masyarakat dari masyarakat yang bekerja secara gotong royong di lahan pertanian menjadi masyarakat individualis yang beraktivitas di pabrik sesuai dengan pembagian kerjanya masing-masing.

Wardhana (1995:19) menjelaskan bahwa dalam usahanya untuk meningkatkan kualitas hidup, manusia berupaya dengan segala daya untuk mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada demi tercapainya kualitas hidup yang diinginkan. Kekayaan yang tersembunyi dalam komponen sosial berupa akal pikiran dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan cara pencapaian sasaran tersebut. Melalui akal pikiran manusia menciptakan peralatan baru yang berupa mesin-mesin dan alat-alat bantu

lainnya yang berteknologi tinggi, untuk dapat menghasilkan produk yang melimpah dalam waktu singkat. Pemakaian mesin peralatan baru dalam bidang industry serta pemanfaatan teknologi untuk mendapatkan produk yang tinggi diharapkan akan dapat mencapai sasaran kualitas hidup manusia yang lebih baik. Dengan menggunakan mesin dan peralatan berteknologi tinggi manusia dapat mengeruk kekayaan alam secara besar-besaran. Tambang-tambang baru dibuka untuk mencari mineral-mineral yang sangat dibutuhkan, kemudian dikirim ke industri-industri untuk diolah menjadi menjadi barang jadi. Kegiatan tersebut dari hari ke hari makin meningkat, seolah-olah sasaran yang hendak dicapai, yaitu peningkatan kualitas hidup, sudah semakin dekat untuk tercapai. Namun dalam kenyataannya, kualitas hidup yang hendak dicapai terasa masih sulit dijangkau, bahkan mungkin terasa makin jauh dari jangkauan. Hal ini tidak lain disebabkan oleh adanya dampak industri terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Dampak terhadap lingkungan dapat mengurangi daya dukung alam yang berarti akan mengurangi kemampuan alam untuk mendukung kelangsungan hidup manusia. Sedangkan dampaknya terhadap manusia, jelas akan mengurangi atau bahkan mungkin akan menurunkan dampak hidup manusia itu sendiri.

Adapun dampak-dampak tersebut, oleh Wardhana (1995:21) dibagi atas dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung ini lebih kepada pengrusakan alam, seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran daratan. Sedangkan dampak pada manusia digolongkan ke dalam dampak tidak langsung. Dampak ini umumnya berhubungan dengan masalah sosial masyarakat atau *psikososioekonomi*. Berikut beberapa dampak tidak langsung tersebut:

a. Urbanisasi

Masyarakat pedesaan yang semula bekerja pada bidang pertanian, namun karena adanya daya tarik industri di daerah perkotaan, berpindah ke daerah industri. Karena mereka tidak berbekal keahlian, maka mereka pindah ke daerah industri untuk sekedar menjadi buruh kasar. Sebagai tenaga kasar, sudah tentu penghasilan mereka pas-pasan sekedar untuk dapat hidup. Tempat tinggal mereka pun seadanya, di bedeng-bedeng atau asrama sederhana. Penataan tempat tinggal dan lingkungan yang seadanya mengakibatkan lingkungan yang kumuh, kotor, tidak sedap dipandang. Akibat dari dampak tak langsung ini sudah pasti akan mengurangi kualitas hidup dan kenyamanan hidup.

Perpindahan masyarakat dari desa ke kota menyebabkan jumlah tenaga kerja di desa menjadi berkurang. Sebelum mereka pindah, mereka menggarap lahan pertanian dan menghasilkan panen yang baik. Namun karena berkurangnya jumlah tenaga kerja di desa, maka tidak tertutup kemungkinan adanya sawah atau lahan pertanian yang terbengkalai, tidak dikerjakan sebagaimana mestinya. Keadaan ini mengakibatkan menurunnya hasil panen. Bila ini terjadi, persediaan pangan nasional akan terganggu.

b. Perilaku

Pada saat masih tinggal di desa, masyarakat hidup dalam suasana tolong menolong, bergotong royong. Hubungan individu antara yang satu dengan yang lainnya terjalin baik. Suasana tenang dan damai di desa menjadikan manusia hidup tentram, tidak diburu-buru oleh waktu. Setelah pindah ke kota, suasana kota yang selalu dikejar oleh waktu, hiruk-pikuk, bising, dan pemandangan yang tidak hijau, menyebabkan manusia

menjadi tegang. Perilaku mereka yang semula ramah dan bersahabat, karena adanya ketegangan dalam dirinya, berubah menjadi kasar. Perilaku yang semula suka tolong menolong berubah menjadi acuh tak acuh dan individualistik.

c. Kriminalitas

Kegiatan industri dan teknologi pada umumnya memerlukan tenaga kerja yang mempunyai keahlian tertentu. Tenaga kerja yang ada pada umumnya masih belum mempunyai keahlian yang dimaksud. Para pencari kerja membutuhkan lapangan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Padahal persaingan kerja sangat ketat sehingga untuk mendapatkan pekerjaan menjadi lebih sulit. Pada sisi lain, masyarakat kota yang kaya dan konsumtif memberikan gambaran yang seolah-olah hidup itu serba enak. Di antara mereka ada yang tidak mau bekerja keras. Sementara ada pencari kerja yang berusaha mencari pekerjaan namun setelah mendapatkan pekerjaan tidak mau bekerja keras, yang diinginkannya hanyalah hidup mewah dan bersenang-senang. Keadaan yang demikian inilah yang mendorong sebagian dari mereka untuk mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras. Jalan pintas tindak criminal pencurian, perampokan, penodongan, dan pemerkosaan mewarnai kehidupan masyarakat industri. Dalam keadaan seperti ini angka kriminalitas akan naik.

d. Sosial Budaya

Orang yang bekerja dalam bidang industri pada umumnya dibatasi oleh waktu yang ketat agar produksi yang tinggi dapat dicapai. Bila perlu kerja lembur atau kerja bergilir diberlakukan bagi para pekerja untuk memperoleh tingkat produksi yang tinggi. Suasana kerja di pabrik

(industri) pada umumnya bising dan pemandangan yang tampak hanyalah peralatan dan mesin yang itu-itu juga (monoton). Keadaan yang seperti itu menyebabkan pekerja di pabrik mudah dihindangi ketegangan jiwa (*stress*). Penyakit ketegangan jiwa dapat berlanjut menjadi penyakit hipertensi, penyakit jantung, dan penyakit lainnya. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh keadaan seperti ini sering disebut *environmental disease* yang pengobatannya memerlukan pendekatan dari berbagai macam aspek sosial kemasyarakatan. Untuk mengatasi ketegangan seperti tersebut di atas, orang berusaha menurunkannya dengan mengunjungi tempat-tempat hiburan, bioskop, diskotik, dan lain sebagainya. Seringkali pula untuk mengurangi atau melupakan ketegangan tersebut mereka meminum minuman keras yang dapat berlanjut pada tindakan-tindakan kekerasan. Pertunjukan di tempat hiburan acap kali juga tidak sesuai dengan budaya kita, bahkan tidak jarang yang menjurus ke arah pornografi yang pada akhirnya dapat membawa ke arah prostitusi. Berkembangnya tempat-tempat hiburan dengan segala kelengkapannya seperti tersebut sudah tentu berdampak pada sosial budaya masyarakat sekitarnya.

Hal penting yang perlu disadari oleh perusahaan adalah fakta bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari dukungan masyarakat, sehingga sangat ironis jika aktivitas bisnis perusahaan justru merugikan masyarakat. Untuk itu, berbagai permasalahan sosial yang timbul akibat pesatnya pembangunan industri memerlukan perhatian besar dan penanganan khusus dari perusahaan-perusahaan industri yang menjalankan aktivitas bisnisnya di tengah lingkungan masyarakat. Dengan demikian diperlukan adanya tanggung jawab sosial

perusahaan atau yang saat ini dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Lingkar Studi CSR Indonesia (2011) dalam Rachman (2011:15) mendefinisikan CSR sebagai upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pada umumnya, konsep CSR menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para stakeholder yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan. Perusahaan yang menjalankan aktivitas CSR akan memperhatikan dampak operasional perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan dan berupaya agar dampaknya positif. Konsep ini kemudian diharapkan agar penyakit sosial seperti kerusakan ekosistem, polusi, kriminal, monopoli, keterbelakangan, diskriminasi, pembabatan hutan, banjir, dan lain-lain dapat diminimalisir (Rahman,dkk 2011:74).

Secara yuridis formal, pemerintah telah memberikan pengakuan dan anjuran terhadap partisipasi pengelolaan lingkungan bagi semua pihak lewat Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab IV pasal 66 ayat 2b dan Bab V pasal 74. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa laporan tahunan perusahaan harus mencerminkan tanggung jawab sosial, bahkan perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan sumberdaya alam harus melaksanakan tanggung jawab sosial. Secara lebih operasional, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KEP-04 /MBU/2007 yang merupakan penyempurnaan dari surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan

Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Hal itu, menunjukkan keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap dunia bisnis, khususnya BUMN dan perusahaan yang operasinya berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam agar melaksanakan praktik *social responsibility*.

Salah satu perusahaan yang operasinya berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam ialah PT Semen Tonasa. Hal ini berarti bahwa perusahaan ini tidak luput dari kewajiban menjalankan program *Corporate Social Responsibility*. Untuk itu, secara berkelanjutan dan sistematis perusahaan ini menerapkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang meliputi kegiatan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Program kemitraan merupakan penyaluran dana hasil penyertaan pemerintah berupa pinjaman modal/investasi kepada pengusaha kecil dan koperasi di wilayah Kabupaten Pangkep dan sekitarnya di wilayah Sulawesi Selatan. Melalui program kemitraan, perusahaan memberikan bantuan kredit lunak kepada pengusaha kecil dan koperasi sebagai modal usaha dan investasi serta bantuan hibah untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan manajerial dan promosi pemasaran/pameran perusahaan. Sementara itu, program bina lingkungan dilakukan dengan tujuan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar pabrik terutama yang bersentuhan langsung dengan dampak lingkungan fisik yang timbul dari operasional perusahaan. Obyek bantuan bina lingkungan meliputi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pengembangan prasarana dan sarana masyarakat seperti jalan, sarana ibadah serta bantuan pompa air untuk pengairan sawah di sekitar pabrik serta kegiatan melelestarikan lingkungan. Namun, dalam implementasinya, hal ini tentu masih menjadi tanda tanya besar. Dampak materil dan non-materil yang ditimbulkan mesti ditelaah ulang secara mendalam. Analisa secara mendalam perlu dilakukan untuk mengetahui

keterjangkauan masyarakat sekitar atas apa yang diberikan oleh perusahaan. Untuk mengukur hal tersebut maka penulis menganggap penting untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Bingkai Sosial Kultural (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Taraweang Kecamatan Labbakkang dan Kelurahan Tonasa Kecamatan Balocci, Pangkep)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka, penulis merumuskan beberapa permasalahan terkait pemahaman manajemen perusahaan dalam memaknai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sosial masyarakat sekitar perusahaan. Oleh karena itu, dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini: “Bagaimanakah penerapan Tanggung Jawab Sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang diterapkan oleh PT Semen Tonasa Pangkep? Bagaimanakah perubahan-perubahan pada aspek sosial kultural masyarakat sekitar industri, dari sebelum masuknya industri hingga berjalannya industri, serta setelah berhentinya proses produksi industri?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang diterapkan oleh PT Semen Tonasa Pangkep.
- b. Bagaimana perubahan-perubahan pada aspek sosial kultural masyarakat sekitar industri, dari sebelum masuknya industri hingga

berjalannya industri, serta setelah berhentinya proses produksi industri.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang *Corporate Social Responsibility*.
- b. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi praktisi akuntansi serta bagi pemegang kebijakan di pemerintahan, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun pedoman penerapan CSR yang lebih baik.
- b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, informasi, dan kelengkapan data yang bermanfaat dalam pertumbuhan perusahaan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi selanjutnya, maka penulis menguraikan kedalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan literatur dan teori-teori yang berkaitan dan menjadi acuan dalam pembahasan materi penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan bagaimana data diolah beserta pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Hadirnya konsep ekonomi berkelanjutan ataupun pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) tidak lain didasari oleh berbagai dampak yang telah dimunculkan terhadap lingkungan akibat berbagai aktivitas manusia (Djajadiningrat dan Famiola:2004:27). Istilah pembangunan berkelanjutan diperkenalkan dalam *World Conservation Strategy* (Strategi Konservasi Dunia) yang diterbitkan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP), *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN), dan *World Wide Fund for Nature* (WWF) pada 1980. Konsep Pembangunan Berkelanjutan ini kemudian dipopulerkan melalui laporan *The World Commission on Environment and Development* yang berjudul “*Our Common Future*” (Hari Depan Kita Bersama) atau lebih dikenal dengan istilah *Brundtland Report* yang diterbitkan pada 1987. Laporan ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Sementara itu, menurut Budimanta (2005),

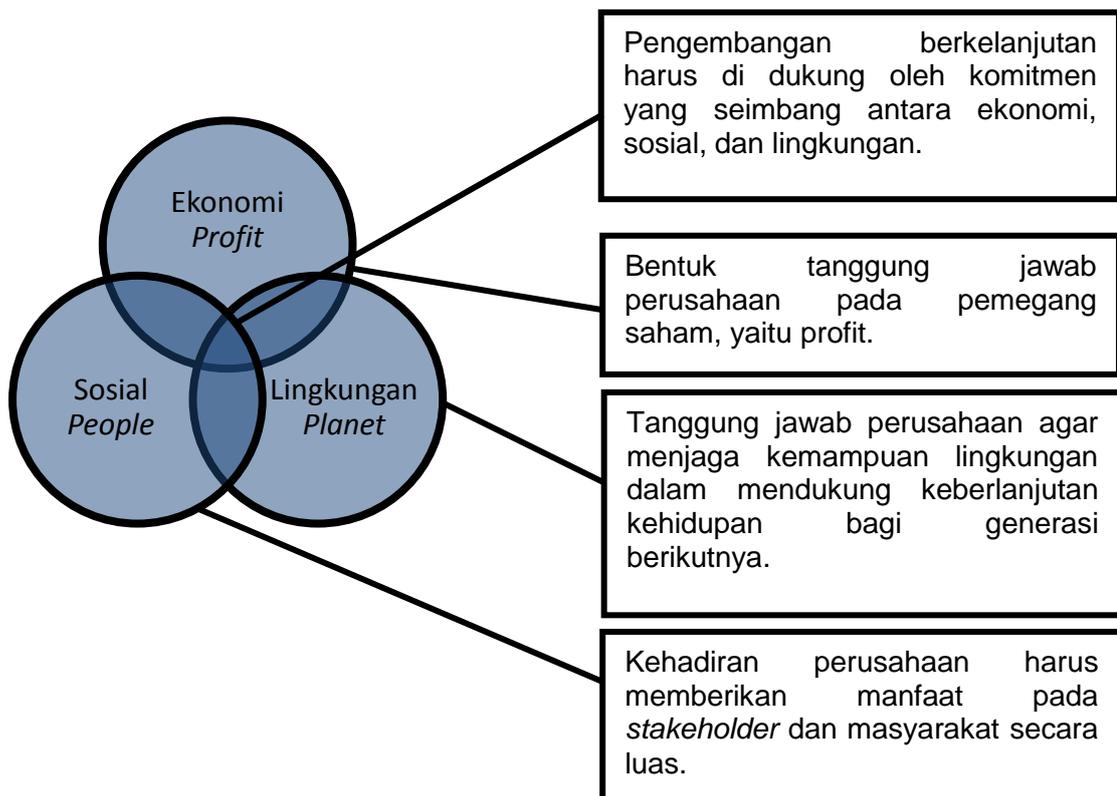
Pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.

Ini didukung oleh Fritjof Chapra (2005) dalam Susilo (2008:185) yang menyatakan bahwa masyarakat berkelanjutan adalah masyarakat yang dapat

memenuhi kebutuhannya tanpa mengurangi kesempatan generasi-generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai bagian yang saling terkait, laju pembangunan harus dikendalikan sebab jika tidak, pembangunan tidak lain sebagai cara atau instrument untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, justru memproduksi kerusakan-kerusakan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu global yang harus dipahami dan diimplementasikan pada tingkat lokal. Pembangunan berkelanjutan sering dipahami hanya sebagai isu-isu lingkungan. Lebih dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga hal kebijakan, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan, seperti yang digambarkan John Elkington dalam Rachman,dkk (2011:12) dalam bagan *triple bottom line* sebagai pertemuan dari tiga pilar pembangunan, yaitu *people, planet, and profit* yang merupakan tujuan pembangunan. Lebih jelasnya, digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 2.1 Keterkaitan integratif *triple bottom line*



Sumber : Rachman,dkk, Panduan Lengkap Perencanaan CSR, 2011, hal. 12

Masih menurut Rachman,dkk (2011:13), operasional perusahaan yang tidak memperhatikan biofisik lingkungan hidup akan mengurangi daya dukung alam pada kehidupan. Lebih jauh lagi, hal ini dapat mengurangi kualitas hidup yang akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Dalam konteks *triple bottom line*, selain untuk meminimumkan dampak negatif operasional perusahaan pada lingkungan biofisik, konteks ini harus juga dilihat pada upaya menjaga daya dukung lingkungan, sosial, dan ekonomi pada perusahaan dan masyarakat bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Tantangan utama bagi pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana upaya untuk mencapai suatu keadilan bagi antar generasi dan antar masyarakat. Di luar itu, pembangunan berkelanjutan adalah inti dari CSR yang tidak boleh dipahami secara parsial sekedar dari aspek sosial, ekonomi, ataupun lingkungan saja, tetapi lebih dari itu. Suatu keharusan untuk melihat keterkaitan di antara semua elemen yang membentuk sebuah sistem CSR. Hal ini karena kondisi dan perubahan satu elemen akan mempengaruhi sistem secara menyeluruh. Dengan pemahaman ini, sebuah intervensi yang efektif dan efisien akan lebih mudah diperoleh untuk mencapai *sustainability*. CSR dan *sustainability* pada dasarnya adalah merajut dan menggerakkan elemen *people, planet, and profit* dalam satu kesatuan intervensi. Cara pandang satu kesatuan intervensi artinya setiap isu yang terkait dengan CSR harus dikaji dari perspektif *people, planet, dan profit*.

2.2. Corporate Social Responsibility

2.2.1. Definisi

Tanggung jawab sosial atau *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) merupakan suatu elemen penting dalam kerangka kelanjutan perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.

Beberapa pakar dan institusi terkait memberikan definisi beragam atas *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Sebuah organisasi dunia *World Bisnis Council for Sustainable Development* (WBCSD) yang dipublikasikan dalam situs *www.wbsd.org.theswitzerland*, mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai:

Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam ekonomi pembangunan berkelanjutan bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas-komunitas setempat (lokal) dan komunitas secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Sementara menurut Darwin (2007) dalam *Majalah Akuntan Indonesia* Edisi 3 Tahun 2007, menjelaskan bahwa CSR merupakan mekanisme yang dilaksanakan secara sukarela oleh perusahaan untuk memasukkan isu sosial dan lingkungan ke dalam operasi perusahaan dan mengkomunikasikannya dengan *stakeholders*.

Sedangkan untuk menghadapi fenomena-fenomena atas perilaku korporasi atau perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggungjawab, di Indonesia sendiri telah diberlakukan Undang-undang (UU) yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yaitu UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1 menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Ayat 2, yaitu bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban

perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran, dan ayat 3, yaitu bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai ketentuan dan perundang-undangan.

Menurut Pinayungan (2010),

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Tanggung Jawab Sosial berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, di mana suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Dalam lingkup internasional, *International Organization for Standardization* (ISO) dalam hal ini ialah ISO 26000 memberikan definisi sendiri terhadap CSR, yaitu

Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.

ISO kemudian menyatakan definisi tersebut sebagai jawaban atas berbagai perdebatan substansial mengenai definisi CSR di kalangan perusahaan. Definisi ini diharapkan mampu menjadi “definisi tunggal” terhadap CSR.

Sementara itu, di lain pihak, Suharto (2008:1) memberikan penjelasan bahwa,

Sampai saat ini, belum ada definisi CSR yang mudah diukur secara operasional. Beberapa UU CSR di Indonesia belum diikuti oleh peraturan di bawahnya yang lebih terperinci dan implementatif. Standar operasional mengenai bagaimana mengevaluasi kegiatan CSR juga masih diperdebatkan. Akibatnya, bukan saja CSR menjadi sulit diaudit, melainkan pula menjadi program sosial yang berwayuh wajah. Banyak perusahaan yang hanya membagikan sembako atau melakukan sunatan massal setahun sekali telah merasa melakukan CSR. Tidak sedikit perusahaan yang menjalankan CSR berdasarkan "*copy-paste design*" atau sekadar "menghabiskan" anggaran. Karena aspirasi dan kebutuhan masyarakat kurang diperhatikan, beberapa program CSR di satu wilayah menjadi seragam dan seringkali tumpang tindih.

Meskipun terdapat definisi – definisi tentang CSR yang beragam, namun konsep CSR ini menawarkan sebuah kesamaan, yaitu keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis dan perhatian terhadap aspek sosial serta lingkungan.

2.2.2 Sejarah Perkembangan *Corporate Social Responsibility*

Prinsip CSR sebenarnya telah lama dibentuk seiring dengan dimulainya usaha bisnis itu sendiri. Bahkan dalam sejarahnya, Bangsa Mesopotamia (1700 SM), melalui Raja Hammurabi pernah menetapkan sanksi hukum yang keras kepada pelaku bisnis di bidang perikanan, kehutanan, dan pertanian jika para pelaku tidak menaati aturan yang berlaku untuk memberdayakan kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya dan menyebabkan ketidaknyamanan lingkungan di sekitarnya (Rachman,dkk:2011).

Seperti yang telah kita ketahui bahwa setiap aktivitas manusia selalu membawa dampak bagi lingkungan hidup bersangkutan di mana aktivitas itu terjadi. Selangkah demi selangkah, industrialisasipun terjadi dan perhatian terhadap isu dampak lingkungan lokal semakin naik ke permukaan, serta berubah menjadi isu lingkungan global. Pada abad ke-20 isu ini berkembang

menjadi suatu perdebatan mengenai kelanjutan dampak ekonomi, masyarakat, dan lingkungan tempat usaha itu berada. Pada masa sekarang, isu ini berkembang lagi menjadi usaha dari tiap pelaku bisnis dan pelaku perusahaan global dalam kaitannya dengan isu lingkungan sekitarnya. (www.environmentalhistory.org/).

Secara singkat, Rachman,dkk (2011:25) membagi periodisasi sejarah yang membangun konsep CSR ini ke dalam sebelas tahap, dan dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

a. Masa Peradaban Kuno

Pada masa tersebut, polusi udara, air, penebangan kayu secara massif dengan tanpa adanya upaya konservasi lahan sehingga menyebabkan erosi tanah secara luas. Bahkan, pencemaran limbah timbal merupakan masalah yang umum terjadi di lahan-lahan usaha yang dilakukan para pelaku bisnis.

b. Masa *Renaissance* Dan Zaman Pertengahan (1200-1750)

Masalah kesehatan masyarakat lokal sebagai akibat dari usaha para pelaku bisnis yang sedang naik daun pada saat itu seperti polusi air, perkayuan, dan tidak adanya usaha konservasi lahan. Masalah tersebut sangat signifikan dan mendapatkan perhatian luas.

c. Masa Pencerahan (1750-1830)

Berbagai usaha dilakukan untuk mencegah keadaan yang lebih buruk dan menciptakan tatanan lingkungan yang lebih baik sebagai perbaikan dan pencegahan kematian yang lebih banyak dialami masyarakat sekitar. Berbagai usaha dilakukan seperti memperbaiki lingkungan kumuh sekitar tempat pelaku bisnis serta mendorong usaha sanitasi yang lebih higienis dengan melibatkan masyarakat sekitar

sehingga secara langsung membuat masyarakat lebih peduli dengan diri dan lingkungannya. Penciptaan teknologi baru dalam pabrik-pabrik industri untuk membuang limbah, sudah mulai masuk dalam praktik para pelaku bisnis.

d. Masa Revolusi Industri (1830-1890)

Pada periode ini, lingkungan yang mulai diperbaiki dan sudah memperlihatkan kemajuan yang agak berarti dengan adanya perbaikan-perbaikan sebelumnya kembali tercemar dengan adanya industri yang tumbuh secara besar-besaran. Banyak pabrik yang menghasilkan limbah asap yang luar biasa padatnya sehingga mengganggu lingkungan. Pada saat itu, wacana pemerintah dan para pelaku bisnis untuk membangun taman publik dan lingkungan hijau terbuka mulai terangkat ke permukaan.

e. Masa Progresif (1890-1920)

Era reformasi dalam kajian lingkungan, sosial, dan ekonomi mulai masuk pada tatanan pemerintahan dan pelaku bisnis. Tuntutan dari para buruh demi kehidupan dan lingkungan yang lebih baik lagi, terutama dengan melihat kondisi perumahan yang kumuh, sanitasi yang buruk, sarana air minum yang kurang memadai, dan polusi industri yang berkembang secara besar, menjadi perhatian utama untuk dilakukannya reformasi dan perbaikan secara menyeluruh. Banyak aktivis dari organisasi independen dan organisasi perempuan menyuarkan kritik terhadap pelaku usaha untuk menuntut adanya kebijakan yang lebih memihak kepada buruh demi perbaikan kualitas hidup buruh dan lingkungan sekitar.

f. Periode 1920-1930-an

Pada periode ini, hampir semua bentuk industri mulai memperlihatkan tingkat polusi yang sudah membahayakan. Industri yang baru berkembang seperti pariwisata juga menyumbangkan tingkat polusi dan pemakaian bahan bakar yang luar biasa tinggi. Penyakit yang muncul seperti kanker akibat radiasi bahan nuklir sebagai bahan bakar industri juga mulai diderita oleh para buruh dan masyarakat sekitar. *National Coast Anti Pollution League* dan *Civillian Conservation Corps* berdiri atas inisiatif untuk mengurangi dampak buruk dari penggunaan bahan bakar yang berbahaya serta memfasilitasi masyarakat dan buruh untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dan jaminan kompensasi yang lebih baik dan adil.

g. Periode 1940-1950

Periode ini merupakan puncak penggunaan CO² yang sudah mulai masuk ambang batas karena produksi dan penggunaannya oleh industri otomotif yang semakin besar, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan industri.

Penggunaan sumber daya alam dapat diperbaharui sudah mulai masuk dalam wacana. Tahun 1948, *Sand Country Almanac* yang didirikan oleh ahli kehutanan, Aldo Leopold, mengungkapkan bahwa pentingnya memperluas tanggung jawab sesama manusia dan tanggung jawab terhadap alam sekitar oleh para pelaku industri. Tahun 1955, konferensi internasional pertama yang membahas polusi udara diadakan di Los Angeles, Amerika Serikat.

h. Periode 1960-1970

Pada masa itu, Rachel Carson dengan bukunya yang berjudul *Silent Spring* membuat suatu perhatian besar terhadap dampak industri yang secara cepat terjadi pada lingkungan di tahun 1962. Pada saat itu, berkembang pula industri perminyakan yang dimotori oleh *General Motors* dan *Standard Oil* (Exxon Mobil). Industri tersebut tentunya menghasilkan limbah timbal yang luar biasa besar sehingga pada tahun 1965, senat di Amerika Serikat perlu mengadakan uji kelayakan industri timbal.

i. Periode 1970-1980

Suatu dekade kebangkitan dan pembersihan polusi dimulai dengan dilahirkannya *environmental protection agency*. Tingkat polusi udara dipangkas secara dramatis melalui usaha penggunaan kendaraan berbahan bakar non-timbal dan industri otomotif mulai memproduksi kendaraan-kendaraan bebas polusi. Pemerintah mengeluarkan inspeksi terhadap para pelaku bisnis yang menggunakan bahan bakar nuklir terkait peristiwa-peristiwa yang telah terjadi (*three mile island accident*).

j. Periode 1980-1990

Bencana-bencana yang timbul sebagai dampak negatif penggunaan teknologi industri mencapai jumlah yang sangat besar di berbagai kawasan dunia. Contohnya, keracunan massal di Bhopal, India, dan meledaknya industri nuklir Chernobyl di Ukraina. Pada masa itu, pembahasan mengenai isu lubang ozon yang semakin membesar karena industri yang secara massif menggunakan *fluorocarbons* mulai dilakukan dan terbentuk Protokol Montreal pada tahun 1987 sebagai tindak lanjut akibat perusakan ozon yang semakin besar. Isu ini merupakan cikal-bakal isu pemanasan global.

k. Periode 1990-2000

Kasus perang Teluk Persia menyebabkan bencana alam yang parah, mengingat hancurnya kilang-kilang minyak akibat peperangan. Oleh karena peristiwa tersebut, perkembangan setiap keputusan politis harus membawa isu lingkungan dan dampak sosial ekonomi dalam setiap kebijakan yang akan diundang-undangkan di Amerika Serikat.

l. Periode 2000-sekarang

Pada era ini, masyarakat semakin mengontrol setiap kebijakan presiden dan kongres di Amerika Serikat agar setiap keputusan yang diambil dapat memperhatikan dampak yang terjadi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Sebagai contoh, pada akhir kepemimpinannya, Presiden Bill Clinton menyiapkan 58 juta ha hutan dan kawasan hutan lindung. Di lain pihak, masyarakat menolak keputusan Presiden George Bush untuk mendukung secara penuh penggunaan energi tradisional yaitu minyak, gas, dan nuklir. Pada akhirnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan laporan mengenai perubahan iklim global sebagai dampak industri yang berkelanjutan.

Selain itu, deklarasi yang menjadi cikal-bakal dan perkembangan CSR adalah sebagai berikut:

- a. 1972: *Stockholm Declaration*
- b. 1987: *Our Common Future*
- c. 1992: *Rio Earth Summit*
- d. 1997: *Kyoto Climate Change Protocol*
- e. 2002: *Johannesburg World Summit of Sustainable Development*
- f. Perkembangan periodisasi investasi tanggung jawab sosial (*Socially Responsible Investment*)

2.2.3 Komponen Utama CSR

Menurut Wibisono (2007) dalam Pinayungan (2010:10), terdiri beberapa komponen utama tanggung jawab sosial, yaitu:

a. Perlindungan lingkungan.

Organisasi lingkungan memiliki peranan sebagai wadah kontrol sosial yang fokus terhadap pembangunan berkelanjutan untuk memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup. Program perlindungan lingkungan ini berfungsi agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan berwawasan lingkungan. Contohnya, manajemen daur ulang.

b. Perlindungan dan jaminan karyawan.

Karyawan merupakan faktor penting bagi perusahaan. Apabila perusahaan bersinergi dengan serikat pekerja, maka hampir dapat dipastikan bahwa kinerja karyawan akan positif. Contohnya, pelatihan/kemajuan karir.

c. Interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat.

Masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dapat mempengaruhi arah dan kebijakan sebuah perusahaan. Peran masyarakat menjadi penting karena masyarakat merupakan salah satu bagian dari komponen *stakeholder* perusahaan. Contohnya, mempekerjakan tenaga lokal.

d. Kepemimpinan dan pemegang saham.

Pemegang saham merupakan pihak yang sangat berkuasa dalam perusahaan. Para direksi maupun manajer yang diangkat harus mengetahui keinginan dari pemegang saham dan memberikan informasi secara transparan mengenai keadaan perusahaan.

Contohnya, semua informasi tentang semua program atau keinginan yang dijalankan perusahaan dapat melibatkan pemegang saham dalam hal-hal yang bersifat non finansial.

e. Penanganan pelanggan/produk.

Menciptakan hubungan baik dengan pelanggan akan memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Jika pelanggan mendapatkan kepuasan dari perusahaan, bisnis akan terus bergulir dengan adanya *repeat order* dari pelanggan. Contohnya, keterlibatan pelanggan dalam pengembangan produk.

f. Pemasok (supplier).

Pemasok merupakan pihak yang menguasai jaringan distribusi. Hubungan yang baik dengan pemasok menguntungkan perusahaan karena pemasok telah mengetahui keinginan perusahaan dan akan memenuhinya sesuai dengan keinginan pelanggan. Contohnya, komunikasi dengan pemasok.

g. Komunikasi dan laporan.

Komunikasi dan pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi, baik bagi *stakeholder* maupun *shareholder*. Sistem informasi ini diperlukan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Contohnya, memasukkan data kontribusi sosial ke dalam laporan tahunan.

2.2.4 Perencanaan *Corporate Social Responsibility*

Rachman,dkk (2011:112) membagi perencanaan CSR ini ke dalam dua jenis, yaitu rencana strategis, yang disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi dengan melaksanakan misi organisasi; dan rencana operasional, yang merupakan rincian tentang pelaksanaan rencana strategis.

Di sisi yang berbeda, Wibisono (2007:121) mengatakan bahwa pada umumnya, perusahaan-perusahaan menerapkan CSR dengan menggunakan pentahapan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan

Dalam tahap perencanaan ini terdiri atas 3 (tiga) langkah utama, yaitu:

- a. *Awarness building*, merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen. Upaya ini dapat dilakukan antara lain melalui seminar, lokakarya, diskusi kelompok dan lain-lain.
- b. *CSR assessment*, merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif.
- c. *CSR manual building*, hasil *assessment* merupakan dasar untuk menyusun *manual* atau pedoman implementasi CSR. Upaya yang mesti dilakukan antara lain melalui *benchmarking*, menggali dari referensi atau bagi perusahaan yang menginginkan langkah instan, penyusunan *manual* ini dapat

dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan.

2. Tahap implementasi

Dalam memulai implementasi, pada dasarnya ada 3 (tiga) pertanyaan yang mesti dijawab, yakni siapa orang yang menjalankan, apa yang mesti dilakukan dan bagaimana cara melakukan sekaligus alat apa yang diperlukan. Dalam istilah manajemen populer, pertanyaan tersebut diterjemahkan menjadi:

- a. Pengorganisasian (*organizing*) sumber daya yang diperlukan.
- b. Penyusunan (*staffing*) untuk menempatkan orang yang sesuai dengan jenis tugas atau pekerjaan yang dilakukannya.
- c. Pengarahan (*directing*) yang terkait dengan bagaimana cara melakukan tindakan.
- d. Pengawasan atau koreksi (*controlling*) terhadap pelaksanaan.
- e. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.
- f. Penilaian (*evaluating*) untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan.

Tahap implementasi ini terdiri atas 3 (tiga) langkah utama, yakni sosialisasi, pelaksanaan dan implementasi.

3. Tahap evaluasi

Setelah program CSR diimplementasikan, langkah berikutnya adalah evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan CSR. Evaluasi selain dari pihak internal perusahaan, juga dapat dilakukan dengan meminta pihak independen untuk melakukan audit implementasi atas praktik CSR yang dilakukan.

Langkah ini tidak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar, tetapi juga mencakup pengendalian resiko perusahaan. Evaluasi dalam bentuk *assessment* audit atau *scoring* juga dapat dilakukan secara *mandatory* misalnya seperti yang diterapkan dalam lingkungan BUMN, untuk beberapa aspek penerapan CSR. Evaluasi tersebut dapat membantu perusahaan untuk menekankan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi CSR sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

4. Tahap pelaporan

Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Jadi, selain berfungsi untuk keperluan *shareholders*, juga untuk *stakeholders* yang berkepentingan.

2.3. Perubahan Sosial Kultural Masyarakat

Menurut Himes dan Moore (1998) dalam Martono (2012:6), perubahan sosial mempunyai tiga dimensi, yaitu dimensi struktural mengacu pada perubahan-perubahan dalam bentuk struktur masyarakat, menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial, dan perubahan dalam lembaga sosial. Perubahan sosial tersebut meliputi bertambah dan berkurangnya kadar peranan, menyangkut aspek perilaku dan kekuasaan, adanya peningkatan atau penurunan sejumlah peranan atau pengategorian peranan, terjadinya pergeseran dari wadah atau kategori peranan, dan terjadinya perubahan dari sejumlah tipe dan daya guna fungsi sebagai akibat dari struktur.

Kedua, dimensi kultural mengacu pada perubahan kebudayaan dalam masyarakat. Perubahan ini meliputi inovasi kebudayaan, difusi, dan integrasi. Inovasi kebudayaan merupakan komponen internal yang memunculkan perubahan sosial dalam suatu masyarakat. Inovasi kebudayaan yang paling mudah ditemukan adalah munculnya teknologi baru. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks memaksa individu untuk berfikir kreatif dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sementara itu, difusi merupakan komponen eksternal yang mampu menggerakkan terjadinya perubahan sosial. Sebuah kebudayaan mendapatkan pengaruh dari budaya lain, yang hal tersebut kemudian memicu perubahan kebudayaan dalam masyarakat yang menerima unsur-unsur budaya tersebut. Dan integrasi merupakan wujud perubahan budaya yang relatif lebih halus. Hal ini disebabkan dalam proses ini terjadi penyatuan unsur-unsur kebudayaan yang saling bertemu untuk kemudian memunculkan kebudayaan baru sebagai hasil penyatuan berbagai unsur-unsur budaya tersebut.

Ketiga, dimensi interaksional mengacu pada adanya perubahan hubungan sosial dalam masyarakat. Dimensi ini meliputi (a) perubahan dalam frekuensi. Perkembangan teknologi telah menyebabkan berkurangnya frekuensi individu untuk saling bertatap muka. Semua kebutuhan untuk berinteraksi dapat dipenuhi dengan memanfaatkan teknologi. Seorang nasabah bank tidak perlu berulang kali bertemu dengan petugas *teller* bank. Fungsi dan peran *teller* bank telah tergantikan oleh mesin ATM (*Automatic Teller Machine* atau Anjungan Tunai Mandiri) yang mampu melayani nasabah selama 24 jam di mana saja, tanpa harus mengantri lama, atau mengisi formulir tertentu. (b) perubahan dalam jarak sosial. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menggeser fungsi “tatap muka” dalam proses interaksi. Individu tidak harus bertatap muka

untuk dapat melakukan komunikasi dan interaksi secara langsung. Bahkan ketika dua individu berada di tempat yang sangat jauh, mereka bisa tetap berkomunikasi meskipun dalam jarak ribuan kilometer. (c) perubahan perantara. Mekanisme kerja individu dalam masyarakat modern banyak bersifat serba *online*, menyebabkan individu tidak banyak membutuhkan orang lain dalam proses pengiriman informasi. (d) perubahan dari aturan atau pola-pola. Banyak aturan serta pola-pola hubungan yang mengalami perubahan seiring perkembangan masyarakat. Emansipasi perempuan dalam dunia kerja misalnya, telah mengubah cara pandang masyarakat dalam menyikapi “perempuan yang pulang malam”. (e) perubahan dalam bentuk interaksi. Interaksi antar individu tidak sekaku pada masa lalu ketika interaksi harus dilakukan secara tatap muka. Di era sekarang interaksi dapat dilakukan kapan saja, melalui telepon, *handphone*, *email*, *chatting*, *facebook*, dan berbagai teknologi canggih lainnya.

Dalam penelitian ini, fokus peneliti dalam melakukan penelitiannya tertuju pada perubahan sosial masyarakat pada dimensi kultural atau kebudayaan masyarakat. Dalam hal ini ialah melihat bagaimana perubahan sosial kultural yang terjadi pada masyarakat seiring perubahan “pola hidup” dengan hadirnya suatu industri di tengah-tengah masyarakat tersebut.

2.3.1 Stakeholder Theory

Lako (2011:5) menjelaskan bahwa dalam teori ini, kesuksesan dan hidup-matinya suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dan para *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Jika mampu, maka perusahaan bakal meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, serta

laba. Dalam perspektif teori *stakeholder*, masyarakat dan lingkungan merupakan *stakeholder* inti perusahaan yang harus diperhatikan. Sementara menurut Gray, Kouhy, dan Adam (1994) dalam Chariri (2008:159) menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerfull stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya*. Definisi *stakeholder* sendiri telah mengalami perubahan dalam beberapa dekade ini. Pada awalnya, Friedman (1962) dalam Chariri (2008:159) mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memakmurkan pemiliknya. Dari definisi ini, jelas bahwa pemegang saham adalah satu-satunya *stakeholder* dalam suatu perusahaan. Namun pada tahun 1983, Freeman dalam Chariri (2008:159) menambahkan konstituen yang lebih banyak, termasuk kelompok yang dianggap tidak menguntungkan seperti pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan regulator.

Gray,dkk (1997) dalam Chariri (2008:160) menyatakan bahwa *stakeholder theory* pada umumnya berkaitan dengan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk *me-manage stakeholdernya*. Oleh karena itu, *stakeholder theory* pada dasarnya melihat dunia luar dari perspektif manajemen. Sedangkan Ullmann (1985) dalam Chariri (2008:160) berpendapat bahwa *power stakeholder* berhubungan dengan “postur stategis” yang diadopsi oleh perusahaan. Menurutnya postur strategis menggambarkan model reaksi yang ditunjukkan oleh pengambil keputusan kunci perusahaan terhadap tuntutan sosial.

2.3.2 Legitimacy Theory

Organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai tersebut selaras, kita dapat melihat tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Ketidaksielarasan actual atau potensial terjadi di antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan (Chariri 2008:160).

Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan dan komunitas sekiranya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu "*social contract*". Teori kontrak sosial menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak sosial secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat di mana masyarakat memberi *cost and benefits* untuk keberlanjutan suatu korporasi. Karena itu, CSR merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat sukarela (Lako, 2011:6).

2.3.3 Teori-teori Perubahan Sosial

Studi mengenai perubahan sosial mengalami perkembangan yang sangat pesat pada abad ke-20, seiring terjadinya revolusi industri di Inggris. Banyak teoritikus yang memusatkan perhatiannya akibat terjadinya revolusi tersebut. Martono (2012:27) menjelaskan beberapa teori perubahan sosial dalam perspektif klasik.

Teori klasik dalam sosiologi dimaknai sebagai teori yang mengawali munculnya berbagai studi kemasyarakatan (sosiologi), kemudian teori ini juga

menjadi dasar bagi munculnya teori-teori yang lahir sesudahnya. Untuk dapat lebih memahami teori klasik, Martono (2012:30) memaparkan beberapa pokok-pokok pemikiran sosiolog klasik mengenai perubahan sosial, sebagai berikut:

1. Ibnu Khaldun: Masyarakat Badui versus Masyarakat Kota

Khaldun (1969) membedakan dua jenis kelompok sosial yang keduanya memiliki karakter yang cukup berbeda. Dua kategori kelompok sosial tersebut adalah pertama, *badawah* atau masyarakat yang tinggal di pedalaman, masyarakat primitif, atau tinggal di daerah gurun. Khaldun sering menyebut ini sebagai masyarakat Badui. Kedua, *hadharah*, yaitu masyarakat yang identik dengan kehidupan kota, Khaldun menyebutnya masyarakat beradab atau memiliki peradaban atau disebut juga masyarakat kota. Masyarakat kota menurut Khaldun banyak berurusan dengan kehidupan yang enak, mewah, dan banyak mengikuti hawa nafsu. Jiwa mereka telah dikotori oleh berbagai macam akhlak tercela. Masyarakat Badui, meskipun juga berurusan dengan dunia, namun masih dalam batas kebutuhan, dan bukan dalam kemewahan, hawa nafsu, dan kesenangan.

Orang Badui lebih berani daripada penduduk kota karena penduduk kota malas dan suka yang mudah-mudah serta larut dalam kenikmatan dan kemewahan. Mereka hidup di tempat-tempat yang jauh di luar kota dan tidak pernah mendapatkan pengawasan tentara. Kehidupan semacam ini membuat orang kota lebih bersifat individualis. Individualis ini kemudian menyebabkan lemahnya solidaritas mereka. Kelompok Badui dinilai memiliki ikatan solidaritas yang kuat. Ikatan solidaritas sosial inilah yang menyebabkan kelompok Badui mampu

mempertahankan diri mereka, Khaldun menyebutkan solidaritas sosial dengan istilah '*asabiyah*'. Solidaritas sosial ini menurut Khaldun menjadi syarat kekuasaan dan kemudian solidaritas sosial inilah yang menyatukan tujuan: mempertahankan diri dan memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh.

2. August Comte: Hukum Tiga Tahap

Comte (1896) berusaha merumuskan perkembangan masyarakat yang bersifat evolusioner menjadi tiga tahapan, yaitu pertama, tahap teologis, merupakan periode paling lama dalam sejarah manusia. Periode ini dibagi dalam tiga subperiode, yaitu *fetisme*, yaitu bentuk pikiran yang dominan dalam masyarakat primitif, meliputi kepercayaan bahwa semua benda memiliki kelengkapan kekuatan hidupnya sendiri. Manusia pada tahap ini mulai mempercayai jimat. *Politheisme*, pada periode ini muncul anggapan bahwa ada kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupan atau gejala alam. Pada tahap ini sudah muncul kehidupan kota, pemilikan tanah menjadi institusi sosial, muncul sistem kasta, dan perang dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menciptakan kehidupan politik yang kekal. *Monotheisme*, yaitu kepercayaan dewa mulai digantikan dengan yang tunggal, dan puncaknya ditunjukkan adanya Katolisisme. Ciri lain tahap teologis, keluarga merupakan satuan sosial yang dominan.

Kedua, tahap metafisika merupakan tahap transisi antara tahap teologis ke tahap positivistik. Tahap ini ditandai dengan satu kepercayaan akan hukum-hukum alam yang asasi yang dapat ditemukan dalam akal budi. Pada tahap ini manusia menganggap bahwa pikiran bukanlah ciptaan zat adikodrati, namun merupakan

ciptaan “kekuatan abstrak”, sesuatu yang benar-benar dianggap ada yang melekat dalam diri seluruh manusia dan mampu menciptakan semua fenomena. Ciri lain dari tahap ini adalah kekuatan Negara-bangsa menjadi suatu organisasi yang dominan. Ketiga, tahap positivistik. Pada tahap ini pikiran manusia tidak lagi mencari ide-ide absolut, yang asli menakdirkan alam semesta dan yang menjadi penyebab fenomena, akan tetapi pikiran manusia mulai mencari hukum-hukum yang menentukan fenomena, yaitu menemukan rangkaian hubungan yang tidak berubah dan memiliki kesamaan. Tahap ini ditandai adanya kepercayaan akan data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir, tetapi sekali lagi pengetahuan itu sifatnya sementara dan tidak mutlak. Ciri lain dalam tahap ini adalah muncul keteraturan sosial yang ditandai dengan munculnya masyarakat industri yang mementingkan sisi kemanusiaan.

3. Karl Marx: Menuju Masyarakat Komunis

Marx (1939) menjelaskan tahap-tahap perubahan sosial dalam enam tahap. Pertama, dimulai dengan adanya masyarakat primitif. Komunitas masyarakat primitif ini merupakan suatu komunitas yang mengakui milik pribadi sebagai milik komunitas dan pembagian kerja yang sangat sedikit. Kedua, struktur sosial komunal purba. Struktur komunitas ini ditandai dengan bentuknya yang lebih besar daripada komunitas primitif, pembagian kerja yang semakin tinggi, dan pemilikan pribadi sudah mulai diakui. Ketiga, sistem feodal, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dalam pembagian kerja dan pola-pola kepemilikan kekayaan pribadi yang lebih ketat. Tahap ini akhirnya memberikan jalan bagi cara-cara produksi borjuis dan hubungan-

hubungan sosial yang menyertainya. Keempat, tahap borjuis, berupa perombakan kehidupan komunal di bawah pengaruh ideologi-ideologi individualis dan berkurangnya hubungan-hubungan yang manusiawi menjadi hubungan-hubungan pemilikan. Kelima, tahap perkembangan kapitalis. Pada tahap ini kelas buruh proletar memiliki hubungan dengan kelompok majikan (borjuis) semata-mata sebagai seorang penjual tenaga kerja yang kegiatan produktifnya digunakan untuk menghasilkan produk-produk yang akan dijual dalam sistem pasar yang bersifat interpersonal. Keenam, tahap komunis, merupakan tahap ketika pemilikan pribadi akan lenyap dan individu akan dapat berinteraksi dalam hubungan-hubungan komunal, tidak selalu berupa hubungan yang bersifat ekonomis. Aspek pembagian kerja yang menekan dan yang merendahkan martabat manusia akan diganti dengan satu sistem yang memungkinkan individu untuk mengembangkan sebesar-besarnya suatu bagian kerja yang sempit.

4. Hebert Spencer: Menuju Masyarakat Heterogen

Pandangan Spencer (1899) mengenai perkembangan masyarakat, memusatkan perhatian pada penambahan jumlah (kuantitas) dan kualitas hubungan antar bagian dalam sistem. Setiap perkembangan akan menyangkut evolusi diri dari yang sederhana menjadi sesuatu yang kompleks. Spencer menggambarkan perkembangan masyarakat dari tipe masyarakat homogen menuju tipe masyarakat yang heterogen. Perubahan ini dianalogikan dengan tipe masyarakat primitif (yang homogen) dan modern (heterogen). Evolusi sosial menurut Spencer berlangsung melalui diferensiasi struktural dan fungsional sebagai berikut: pertama, dari yang sederhana menuju yang kompleks; kedua,

dari tanpa bentuk yang dapat dilihat ke keterkaitan bagian-bagian; ketiga, dari keseragaman, homogenitas ke spesialisasi, heterogenitas; dan keempat, dari ketidakstabilan ke kestabilan. Keempat proses ini adalah proses yang bersifat umum (universal). Proses evolusi tersebut sebenarnya melalui beberapa tahap perkembangan, yaitu: pertama, tahap masyarakat sederhana. Masyarakat ini dicirikan dengan masyarakat yang saling terisolir, aktivitas seluruh anggotanya serupa, tidak ada organisasi politik. Kedua, masyarakat kompleks, yang dicirikan dengan adanya pembagian kerja antarindividu, serta pembagian fungsi antara bagian-bagian masyarakat yang mulai muncul, mulai ada organisasi politik. Ketiga, masyarakat lebih kompleks, yang dicirikan dengan adanya wilayah bersama, memiliki konstitusi dan sistem hukum yang permanen. Keempat, peradaban, yaitu sebuah kesatuan sosial yang paling kompleks, terbentuknya Negara-bangsa, adanya federasi beberapa negara atau diwujudkan dengan kekaisaran yang besar.

5. Emile Durkheim: Pembagian Kerja dan Solidaritas Sosial

Pemikiran Durkheim (1982) didasari pada gejala sosial yang terjadi pada masa revolusi Industri di Inggris, ia mengamati perubahan dari masyarakat primitif (tradisional) menuju masyarakat industri. Aspek yang menjadi perhatian Durkheim adalah pada pembagian kerja dalam kedua tipe masyarakat tersebut. Faktor utama yang menyebabkan perubahan bentuk pembagian kerja tersebut menurut Durkheim adalah penambahan jumlah penduduk. Menurutnya, pembagian kerja dalam masyarakat berhubungan langsung dengan kepadatan moral atau dinamika suatu masyarakat. Kepadatan moral merupakan tingkat kepadatan interaksi antaranggota masyarakat. Durkheim mengamati

bahwa peningkatan sistem pembagian kerja tersebut berimplikasi pada perubahan tipe solidaritas sosialnya. Ia menjelaskan adanya dua tipe solidaritas sosial yang dikaitkan dengan tingkat pembagian kerja dalam masyarakat. Pada masyarakat dengan sistem pembagian kerja yang rendah, akan menghasilkan tipe solidaritas mekanik, sedangkan pada masyarakat dengan pembagian kerja yang kompleks akan menghasilkan tipe solidaritas organik.

Kedua tipe solidaritas sosial ini memiliki ciri sebagaimana dijelaskan Durkheim. Pertama, anggota masyarakat dengan tingkat pembagian kerja rendah (solidaritas mekanik), masih terikat satu sama lain atas dasar kesamaan emosional dan kepercayaan, serta adanya komitmen moral. Perbedaan adalah sesuatu yang harus dihindari. Pada masyarakat dengan tingkat pembagian kerja yang tinggi (solidaritas organik), sangat memungkinkan terjadi perbedaan, dan masyarakat disatukan oleh saling ketergantungan fungsional. Kedua, solidaritas mekanik didasarkan pada kesadaran kolektif yang kuat, anggota masyarakat diharapkan mampu mempertahankan kesamaan, sedangkan pada solidaritas organik, otonomi individu sangat dihargai mengingat setiap individu menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Ketiga, dari segi kontrol sosial, dalam solidaritas mekanik, nilai dan norma bersifat umum dan abstrak, hukum yang berlaku lebih bersifat represif. Pada solidaritas organik, hukum lebih bersifat restitutif, maksudnya hukum diberlakukan hanya semata-mata untuk mengembalikan masyarakat pada kondisi semula. Hukuman diberikan oleh individu yang memang diberi tugas untuk melakukan kontrol sosial.

6. Ferdinand Tonnies: *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*

Tonnies (1887) memiliki teori yang sangat penting, ia mampu membedakan konsep masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Dua konsep tersebut dalam konsep Tonnies dinamakan *gemeinshaft* dan *gesellschaft*. Menurut Tonnies, *gemeinshaft* merupakan situasi yang berorientasi pada nilai, aspiratif, memiliki peran dan terkadang sebagai kebiasaan asal yang mendominasi kekuatan sosial. *Gemeinshaft* lahir dari individu; keinginan untuk berhubungan didasarkan atas kesamaan dalam keinginan dan tindakan. Kesamaan individu dalam hal ini merupakan faktor penguat hubungan sosial, yang kemudian diperkuat dengan adanya hubungan emosional serta interaksi antarindividu. *Gesellschaft* merupakan sebuah konsep yang menunjuk pada hubungan anggota masyarakat yang memiliki ikatan yang lemah, kadangkala antarindividu tidak saling mengenal, nilai, norma, dan sikap menjadi kurang berperan dengan baik.

Tonnies menggambarkan *gemeinshaft* adalah *wessenwill*, yaitu bentuk-bentuk kehendak, baik dalam arti positif maupun negatif, yang berakar pada manusia dan diperkuat oleh agama dan kepercayaan, yang berlaku di dalam bagian tubuh dan perilaku atau kekuatan naluriah. Jadi, *wessenwill* itu sudah merupakan kodrat manusia yang timbul dari keseluruhan kehidupan alami. *Gesellschaft* disebut dengan konsep *kurwille* yang merupakan bentuk-bentuk kehendak yang mendasarkan pada akal manusia yang ditujukan pada tujuan-tujuan tertentu dan sifatnya rasional dengan menggunakan alat-alat dari unsur-unsur kehidupan lainnya atau dapat pula berupa pertimbangan dan pertolongan.

7. Max Weber: Perkembangan Rasionalitas Manusia

Pemikiran Weber (1904) yang menjelaskan mengenai proses perubahan sosial dalam masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan rasionalitas manusia. Menurut Weber, bentuk rasionalitas manusia meliputi *mean* (alat) yang menjadi sasaran utama serta *ends* (tujuan) yang meliputi aspek kultural, sehingga dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya orang besar mampu hidup dengan pola pikir yang rasional yang ada pada seperangkat alat yang dimiliki dan kebudayaan yang mendukung kehidupannya. Orang yang rasional akan memilih alat mana yang paling benar untuk mencapai tujuannya.

Weber menyebutkan adanya empat tipe rasionalitas yang mewarnai perkembangan manusia. Empat tipe tersebut adalah, pertama, *traditional rationality* (rasionalitas tradisional). Rasionalitas ini bertujuan untuk memperjuangkan nilai yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat. Rasionalitas ini kadangkala disebut sebagai tindakan irasional. Kedua, *affective rationality* (rasionalitas afektif). Rasionalitas ini merupakan tipe rasionalitas yang bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut. Ketiga, *value oriented rationality* (rasionalitas yang berorientasi pada nilai). Rasionalitas ini merupakan suatu rasionalitas masyarakat yang melihat nilai sebagai potensi atau tujuan hidup, meskipun tujuan itu tidak nyata dalam kehidupan keseharian. Keempat, *instrumental rationality* (rasionalitas instrumental). Rasionalitas ini sering disebut juga dengan “tindakan” dan “alat”. Pada tipe rasionalitas ini, manusia tidak hanya menentukan tujuan yang ingin dicapai, namun

ia secara rasional telah mampu menentukan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

2.3.4 Industrialisasi dan Perubahan Sosial Kultural Masyarakat

Martono (2012:12) menjelaskan bahwa terdapat perubahan yang mendasar antara perubahan sosial dengan perubahan budaya. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan sosial meliputi perubahan dalam perbedaan usia, tingkat kelahiran, dan penurunan rasa kekeluargaan antar anggota masyarakat sebagai akibat dari terjadinya arus urbanisasi dan modernisasi. Perubahan budaya jauh lebih luas dari perubahan sosial. Perubahan budaya menyangkut banyak aspek dalam kehidupan seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, aturan-aturan hidup berorganisasi, dan filsafat. Perubahan sosial dan perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakat saling berkaitan, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan tanpa masyarakat. Persamaan antara perubahan sosial dan perubahan budaya adalah keduanya berhubungan dengan masalah penerimaan cara-cara baru atau suatu perubahan terhadap cara-cara hidup manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Dengan demikian, datangnya modernisasi yang ditandai dengan industrialisasi, turut serta menyumbangkan tatanan hidup baru bagi masyarakat.

Proses industrialisasi mau tidak mau membawa perubahan pada keadaan masyarakat. Eksistensi industri di tengah-tengah masyarakat berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Secara ekonomi, keberadaan industri dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kesempatan kerja. Secara sosial, adanya industri berdampak pada perubahan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Secara ekologis, industri dapat merubah infrastruktur

masyarakat maupun terjadinya pencemaran lingkungan. Tumbuh dan berkembangnya industri juga tidak terlepas dari peran masyarakat atau komunitas di mana industri itu berada. Komunitas merupakan tempat di mana industri mendapatkan faktor-faktor produksinya seperti bahan baku dan tenaga kerja. Selain itu komunitas adalah pasar bagi industri untuk memasarkan hasil produksinya (Dee:2010).

Lubis (1987) dalam Dee (2010) menambahkan bahwa pola hubungan yang saling mempengaruhi antara industri dengan masyarakat, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, kehadiran industri di tengah-tengah masyarakat akan mempengaruhi perkembangan masyarakat itu sendiri, baik secara ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Demikian juga halnya dengan industri, di mana kelangsungan industri sangat bergantung dari penerimaan masyarakat setempat. Saling keterkaitan sebagaimana penjelasan di atas menunjukkan bahwa sebuah industri haruslah senantiasa menjalin hubungan dengan masyarakat atau lingkungan sekitarnya, karena keberadaan industri dapat dipengaruhi dari keadaan masyarakat di sekitarnya, dan hanya industri yang bisa beradaptasi secara tepat terhadap tuntutan lingkungan dan masyarakat setempat yang akan dapat mencapai keberhasilan.

Secara lebih khusus, Harris (1979) dalam Sairin,dkk (2002:167) menjelaskan bahwa dalam memahami perubahan sosial kultural, ia harus dipilah terlebih dahulu. Harris memilahnya kedalam tiga bagian:

- a) Infra struktur, mencakup corak produksi dan reproduksi, corak produksi mencakup teknologi dan kondisi material yang memungkinkan perluasan atau pembatasan kegiatan produksi subsistansi masyarakat, corak produksi juga mencakup batas-

batas dan peluang yang di sedikan oleh interaksi antara teknologi tertentu dengan lingkungan tertentu pula. Infrastruktur merupakan pola hubungan teknologi dan lingkungan, ekosistem, dan pola-pola kerja penggalian energi dari alam.

- b) Struktur mencakup ekonomi domestik dan ekonomi politik. Ekonomi domestik berkaitan dengan organisasi reproduksi praktik-pratik produksi, dan konsumsi dasar dalam kelompok domestik. Sedangkan ekonomi politik terkait dengan oraganisasi reproduksi, produksi, pertukaran dan konsumsi dalam dan antar unit sosial yang lebih luas dari unit domestik seperti desa, wilayah klan, negara atau bahkan imperium.
- c) Supra struktur mencakup kepercayaan, seni, sastra, ritual, ilmu pengetahuan, dan filsafat yang berkembang dalam masyarakat.

Aditjonro (2003:362) menjelaskan, industrialisasi dalam arti sempit, dapat diartikan sebagai pembangunan industri atau pabrik-pabrik. Tetapi dalam arti yang lebih luas, industrialisasi bermakna membangun perekonomian sebuah negara terutama yang bertumpu pada pengembangan sektor industri. Dengan kata lain, industri menjadi tulang punggung perekonomian seluruh negara dan bangsa itu.

Sementara itu, jika dilihat dari segi masyarakatnya, modernisasi terjadi melalui proses panjang, namun dapat terjadi dalam waktu singkat. Soemardjan (1993) dalam Martono (2012:84), memaparkan beberapa tahap dalam proses modernisasi, yaitu

1. Modernisasi tingkat adat, ditandai dengan masuknya peralatan industri maupun konsumsi modern yang berwujud alat-alat yang berteknologi tinggi. Masyarakat pada tahap ini hanya mampu menggunakan alat-alat

melalui petunjuk teknis secara manual, dan masyarakat kurang memperhitungkan dampak yang ditimbulkannya.

2. Modernisasi tingkat lembaga, ditandai dengan masuknya jaringan sistem kerja modern di kalangan masyarakat lokal. Modernisasi dalam tingkat institusi atau kelembagaan, dapat terjadi karena masuknya kelembagaan birokrasi modern yang melayani kepentingan negara.
3. Modernisasi tingkat individu, dalam tahap ini manusia sudah mampu memperbaiki sendiri peralatan yang dimilikinya, menyempurnakan atau menambah dengan peralatan lain.
4. Modernisasi tingkat inovasi, ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk dapat menciptakan sendiri barang yang dibutuhkan, meskipun harus melalui jaringan kerja dengan masyarakat yang lebih luas.